KARO FOUNDATION

Edisi No.: 1-III/Agt 2026 **TAMAiJE**

TAMAIJE

ᯅᯖ-ᯉᯬᯅᯖ- ᯅᯀᯬᯉ



"Dalam dunia militer, tugas intelijen itu artinya 'siap mati'. Sangat jarang ada pasukan intel perempuan di masa itu. Jabatannya jelas sebuah keistimewaan"

Misi Kemanusiaan Karo Foundation Menjemput Kehormatan Mbaru Beru Ginting Sang Wanita Intelijen

taneh karo
malem mejile

**REDAKSI
TABLOID TAMAiJE**

Penanggung Jawab
Letjen TNI (Purn) Musa Bangun
(Ketua Umum Karo Foundation)

Wakil Penanggung Jawab
Benyamin Sembiring

Penggagas
Ketua Dan Anggota Dewan Pembina
Muhammad Tempel Tarigan
Pdt Juniaman Sembiring Kembaran

Pemimpin Redaksi/Redaktur Pelaksana
Elitha Evinora Br Tarigan

Sekretaris Redaksi
Jerrycho Sinulingga

Redaksi
Dr Ernalem Br Bangun
Dr Yuni Br Ginting MH.

Pembantu Umum
Andiko Ginting, Tobby Sembiring
Feri Ginting, Efran Tarigan

Alamat Redaksi
Graha YPPSDP Jl. Kramat Kwitang No. 21,
Kwitang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10420

Kontributor
Prof (Em). Dr. Ing Ir. Darwin Sebayang
Robinson Sitepu
Martin Luther Peranginangin

Grafis & Desain Cover dan Halaman
Elitha Evinora beru Tarigan
Benyamin Sembiring
Jerrycho Sinulingga

Para pembaca dapat berperan serta menyumbang tulisan ilmiah-populer, berita tentang tanah Karo sampai berita ringan, saran, kritik, dll. Sumbangan tulisan dapat dikirimkan ke redaksi Tabloid TAMAiJE.

+62 853-3806-3932
karofoundation.mjj@gmail.com

KAROLOGIA

Makna Merdeka di Mata Pa Bahun

MT Tarigan

Sentabi!

Saya menganjurkan agar sebelum membaca tulisan ini, Anda sebaiknya mendengar dahulu lagu Sora Mido karya Djaga Depari yang menggambarkan lantunan perasaan orang Karo.

Pengorbanannya tertulis dalam lirik-lirik kata seperti: ngayak merdeka ndube, kuta meseng, paya megara, iluh mambur.

Kemerdekaan 17 Agustus 1945, selintas secara pribadi, suasana kebatinan semangat orang Karo masih bisa saya rasakan saat pulang mengungsi pada tahun 1949 silam.

Mulih mengungsi usai Agresi Militer Belanda II, umur saya sekitar empat atau lima tahun kala itu. Sepanjang perjalanan pulang dari pengungsian, setiap berjumpa dengan orang yang kembali ke kampung halaman, mereka saling berteriak, "MERDEKA!" dan langsung disapa balik, "MERDEKA!" dengan sikap hormat dan berapi-api.

Suasana gembira dan gelora patriotisme sangat terasa di kampung saya, Tanjung Merawa, Tiganderket. Kebahagiaan ini terus terasa hingga saya masuk Sekolah Rakyat pada tahun 1951.

Saat kami bermain perang-perangan, misalnya, ketika tema permainan adalah melawan penjajah Belanda, selalu terjadi perdebatan dan pertengkaran dalam menentukan siapa yang menjadi Belanda. Tidak ada yang mau!

Anak yang menjadi tentara Belanda akan dianggap sebagai pengkhianat betulan. Permainan baru disetujui setelah ada kesepakatan bahwa main perang-perangan dibuat dua kali agar kami bergantian menjadi tentara Belanda-nya. Intinya, tidak ada yang mau memerankan musuh.

Idola kepahlawanan kami saat itu adalah Djamin Ginting, Payung Bangun, dan Selamat Ginting. Mereka itulah tokoh gerilya yang kami sanjung dan kagumi.

Salah satu pahlawan kami lainnya waktu itu adalah Kapten Pala Bangun yang gugur dalam Pertempuran Bertah pada tanggal 7 Mei 1949. Walau saat itu belum ada radio, berita gugurnya Kapten Pala Bangun tersebar luas dan menjadi pembicaraan di mana saja; di sekolah-sekolah, di kedai-kedai kopi, bahkan di pancuren tempat pemandian.

Gugurnya Kapten Pala Bangun menjadi pembicaraan hangat orang Karo. Begitulah suasana saat itu dalam kenangan saya.

MERDEKA, MERDEKA, MERDEKA!

Suasana Hari Merdeka yang ke-81 masih tetap membara di Bumi Karo hingga kini. Namun, saat menulis artikel ini, saya teringat celotehan Pa Bahun dahulu. Beliau seorang tokoh spiritual dari Limang Perbesi yang celotehannya selalu menjadi pembicaraan hangat di masyarakat Karo.

"Enggo merdeka nim gonjenta pe narsar denga asa gundari... Iketna naroh manok bas isangna. Em nanam merdeka ndai nim... Terpanmu dage naroh bas teroh isangmue. Ma lenga seh kubabahmu amin panmu atemu... Lenga nak. Rakyat lenga merdeka. Lenga bias page rebina, lenga tersekolahkenna anakta meganjang. Simbisanta pe gundari enggo lanai atena keleng rakyatna. Ah, ah, ma idahko makam pahlawan Kabanjahe gundari? Ah, enggo bergehen lanai ihormati siencikep layar-layar sigundari.

"Saya pun, Sang Jandi La Surong, ikut berceloteh, "Siapa bilang rakyat Karo tidak meneriakkan kata MERDEKA? Ya, rakyat Karo sudah merdeka hingga pelosok desa, di kedai kopi, dan di tapin ingan ridi. Enggo merdeka ngisap ganja. Enggo merdeka main judi bage pe. Erlagu lahang alias free sex. MERDEKA nim! Tuhu nge enggo merdeka rayat Karo sirulo... Uga ninta?

Penulis adalah saksi sejarah bernama MT Tarigan yang lahir pada 14 Agustus 1943.
Editor: Elitha Evinora beru Tarigan

Coretan Kata

Saat ini, dunia seolah terpana dengan kemunculan teknologi baru bernama Artificial Intelligence (AI) yang membuat mesin mampu meniru kecerdasan manusia. Banyak yang takut karena merasa terancam akan kehilangan pekerjaannya, tapi sebagian juga senang sebab merasa diuntungkan. Tapi, bagi orang yang optimis, segala macam teknologi tidak akan berarti tanpa digerakkan oleh manusia sendiri. Tapi banyak yang lupa tentang hal ini.

Teknologi datang silih berganti. Jangan biarkan pikiran anda terbebani, kecuali anda mendapatkan keuntungan dari teknologi itu. Demikian juga Majalah TAMAIJE edisi Agustus 2026 ini. Saat melangkahkan kaki ke majalah ini, saya hanya punya satu misi, yaitu menjadikan kekayaan budaya Taneh Karo dikenal kembali di seluruh dunia. Pesan ini adalah undangan kepada para pembaca, para kreator, dan mitra kami di Karo Foundation menjadi saksi mata perubahan mutlak. Masa depan Majalah TAMAIJE dimulai dari sekarang, dan ini akan menjadi sesuatu yang spektakuler. Bujur ras Mejuah-Juah Kita Kerina! Salam hangat dari meja redaksi TAMAIJE.

Pemimpin Redaksi, Elitha Evinora beru Tarigan

Piso Surit dari Tanah Karo: Menelusuri Jejak Mbaru beru Ginting, Sang Intelijen Wanita yang Terlupakan

Elitha Evinora beru Tarigan

Mbaru beru Ginting (102) adalah serpihan sejarah yang sengaja dilupakan. Namun, dalam perang revolusi fisik di Taneh Karo, Sumatra Utara, beru (perempuan) ini bertaruh nyawa di garda depan bersama Djamin Ginting, sang Pahlawan Nasional. Ketika sang jenderal pulang membawa bintang, nama Mbaru pulang membawa bintang, nama Mbaru justru lenyap dari daftar resmi veteran perang.

“Saya tidak mengerti mengapa saya tidak mendapat pensiun veteran. Yang mendapat (gelar) justru mereka yang lebih muda, yang tidak pernah turun ke medan perang. Teman-teman saya yang ikut berjuang di hutan Desa Sarinembah hingga ke Manuk Mulia dan Kutambaru justru tidak mendapat gelar sama sekali,” ujar Nini (Nenek) Mbaru saat berbincang dengan redaksi. Tatapannya nanar menembus pekatnya ketidakadilan birokrasi.

Jauh sebelum peluru dan mesiu mendikte jalan hidupnya, Mbaru kecil lahir di Desa Lambar, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo. Ia tumbuh dengan pondasi adat yang kuat sebagai putri dari pasangan Naktaki Ginting dan Roncah beru Karo.

Sebagai anak keempat dari enam bersaudara, masa remajanya direnggut paksa oleh perang. Jiwa pergetget (gigih dan tangguh) khas perempuan Karo miliknya ditempa dalam nestapa. Romantisme masa muda berganti dengan getirnya hari-hari di pengungsian - sebuah labirin trauma yang menyakitkan akibat kejamnya peperangan.

“Kami, para pejuang Shindo saat itu, tidak mengenal panas dan hujan. Kami mengurus perbekalan para tentara dengan cara meminta beras kepada seluruh penduduk kampung. Setiap rumah memberi beras seadanya, kadang hanya satu gantang, dua gantang, atau satu tumba. Tanpa paksaan,” ungkapnya, mengenang jaringan logistik yang dibangunnya.

Berpindah dari satu pos gerilya ke pos lainnya sudah menjadi takdir yang harus ia jalani sejak kecil. Selama masa pengungsian yang mencekam, ia sudah terbiasa bergotong-royong membangun lahan pertanian darurat serta mendirikan rumah siwaluh jabu - rumah adat Karo yang dapat dihuni oleh 8 pasangan - bersama keluarga besarnya demi bertahan hidup.

“Dulu, kalau harus pindah ke dalam hutan, aku bertugas langsung membuka lahan pertanian untuk menanam kentang,” ujar Mbaru, sembari tertawa getir mengenang masa lalunya yang sarat mara bahaya.

Kini, riuh rendah perjuangan itu telah menguap. Mbaru menghabiskan sisa napasnya di Desa Salit, sebuah wilayah yang letaknya cukup jauh dari tanah kelahirannya.

Ia tidak ingin tinggal dengan anaknya karena Ia sangat suka hidup mandiri. Tubuhnya masih tegap dan kuat berjalan jauh. Ia mengaku sangat bahagia dengan kehidupan yang Ia jalani.

JEPANG DIAM-DIAM UBAH NAMA SRIKANDI JADI SHINDO

Ia mengisahkan perjalanannya sebagai seorang tentara wanita saat berumur belasan tahun, Mbaru yang baru berumur 13 tahun ternyata sudah maju ke baris depan medan pertempuran.

Kata Mbaru, Ia dan tentara wanita yang maju di baris depan medan pertempuran diberi nama Shindo. Kata Shindo (yang berasal dari pelafalan bahasa Jepang Shindō) memiliki arti Jalan Kesetiaan Mutlak atau Ketundukan Jiwa kepada Kaisar. Ketika Jepang mulai terdesak di Perang Pasifik pada pertengahan tahun 1944, fungsi laskar perempuan (Srikandi/Fujinkai) diubah secara radikal menjadi Shindo.

Para personel Shindo yang masih berusia 13 tahun ini mengemban misi berbahaya, yakni menyusup dan membuka jalur lintas tersembunyi bagi pasukan pejuang kemerdekaan. Sebelum nama Shindo, Mbaru mengungkapkan bahwa milisi perempuan asal Desa Lambar dan Sukadame ini awalnya dijuluki Barisan Srikandi.

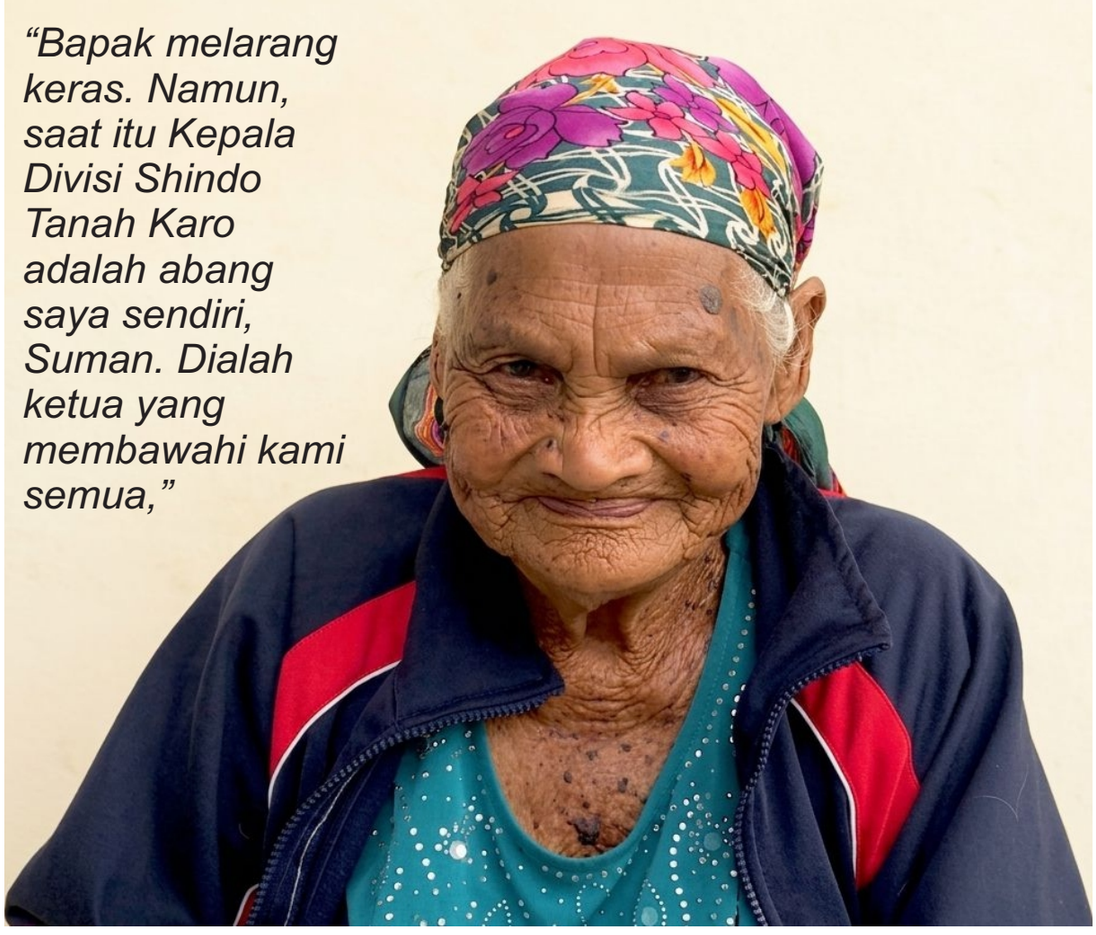
“Khusus perempuan, dulu kami namanya Srikandi. Karena itulah adik perempuan saya yang bungsu kami namakan Srikandi,” ungkap Mbaru, memperlihatkan bagaimana nama saudaranya pun menjadi bukti historis.

Kini, pada usianya yang telah melampaui satu abad-tepatnya 102 tahun-Mbaru menolak takluk pada sandungan umur. Tubuhnya masih tegap, kakinya masih kuat melangkah jauh, dan ia memilih hidup mandiri. Di tengah kesunyian Desa Salit, sang mantan agen rahasia garis depan ini mengaku bahagia dengan jalan takdir yang telah dijalaninya.

DI GARIS DEPAN BERTAHUN-TAHUN

Saat itu, pintu masuk Mbaru sebagai anggota Sindo terbuka lebar karena faktor sang abang. Lelaki bernama

“Bapak melarang keras. Namun, saat itu Kepala Divisi Shindo Tanah Karo adalah abang saya sendiri, Suman. Dialah ketua yang membawahi kami semua,”



Mbaru beru Ginting berharap generasi muda sekarang tidak banyak mengeluh pada apapun sebab di masa kemerdekaan para pejuang hidup dengan situasi sulit tanpa listrik, dan garam yang membuat cita rasa makanan menjadi tawar (Fotografer: Elitha Evinora beru Tarigan).

Suman itu bukan orang sembarangan sebab ia menjabat sebagai Kepala Divisi Shindo Taneh Karo. Hubungan darah ini menjadi tameng sekaligus tiket bagi Mbaru untuk menembus restu keluarga. Padahal, sang ayah sendiri sejak awal melarang keras anak perempuannya itu ikut memanggul risiko di medan laga.

"Bapak melarang keras. Namun, saat itu Kepala Divisi Shindo Tanah Karo adalah abang saya sendiri, Suman. Dialah ketua yang membawahi kami semua," kenangnya mengenai pembangkangan demi ibu pertiwi tersebut.

Langkah Mbaru dan abangnya mencerminkan keputusasaan massal yang melanda desanya kala itu. Blokade musuh dan kematian yang mengintai di setiap sudut memaksa seluruh garis keturunan angkat senjata.

"Iya, semua pemuda-pemudi dari desa kami dulu menjadi anggota. Saat itu, hampir tidak ada lagi tentara yang tersisa karena sudah tewas semua," ungkap Mbaru. Sebuah testimoni kelam yang mengonfirmasi betapa berdarahnya perang mempertahankan kemerdekaan di bumi Karo.

Jejak perjuangan Mbaru sebagai laskar Shindo membawanya jauh ke pedalaman konflik, menembus pertempuran sengit di Desa Sarinembah dan Manuk Mulia. Di bawah rimbunnya hutan belantara Karo, ia bertaruh nyawa di tengah hujan peluru.

Mbaru tidak lagi ingat secara pasti angka tahun ketika ia ditempatkan di pos pengamanan kedua desa tersebut. Namun, memorinya merekam jelas sebuah anomali sejarah yaitu masa-masa membingungkan ketika Indonesia seharusnya sudah dinyatakan merdeka dan aman di tahun 1945, tetapi entah mengapa, genderang perang tiba-tiba kembali bertalu dengan heba - sebuah fase yang dalam catatan sejarah merujuk pada ketegangan Agresi Militer Belanda pasca proklamasi.

"Waktu itu seharusnya kami sudah bisa pulang, tetapi kami memutuskan untuk tetap bertahan di sana," kata Mbaru, menegaskan prinsip keteguhan sikap pantang mundur demi martabat tanah leluhur.

Mbaru menegaskan bahwa sejarah wajib mencatat nama Shindo. Saat abangnya menjabat sebagai pemimpin laskar, sebanyak 16 perempuan resmi terdaftar sebagai anggota inti. Seluruh personel ini direkrut dari dua wilayah yang saling bertetangga, diantaranya Desa Lambar dan Desa Sukadame.

"Ada 16 wanita yang tergabung dalam Shindo waktu itu. Salah satu teman saya bernama Nande Sinar," kenangnya, menyebut satu per satu saksi hidup yang kini turut terlupakan oleh negara.

Selama dua tahun penuh, ke-16 perempuan tangguh ini memanggul takdir sebagai kombatan garis depan. Namun, sebuah keganjilan taktis terekam kuat dalam ingatan Mbaru ketika Jepang mulai bertekuk lutut akibat perang sengit melawan Sekutu, laskar Shindo justru diperintahkan maju untuk membendung laju pasukan Belanda.

"Jadi saat itu terjadi peperangan antara Belanda, Jepang dan kami. Saat Jepang kalah justru kami harus kembali berperang melawan Belanda. Aku lupa tahun berapa tepatnya," ungkap Mbaru.

SHINDO, INTELIJEN WANITA YANG DITUTUPI OLEH JEPANG

Perlu diketahui bila perjuangan perjuangan Mbaru beru Ginting bersama Djamin Ginting terjadi pada rentang tahun 1942–1949. Angkatan Darat Jepang pertama kali masuk dan menduduki wilayah Taneh Karo secara bertahap sejak tanggal 12 Maret 2042.

Sebagai anggota pasukan Shindo, Mbaru Beru Ginting wajib menghafal lagu berjudul Aikoku Koshinkyoku yang dirilis Jepang sejak tahun 1937.

Berdasarkan investigasi sejarah yang sempat diangkat oleh media The Japan Times pada tanggal 5 Juli 2015, lagu Aikoku Koshinkyoku sengaja dirancang bukan sekadar untuk menghibur, melainkan sebuah instrumen doktrin yang dibuat untuk mengajari para patriot Jepang cara membunuh.

Di dekade 1940-an, ketika persediaan prajurit pria mulai menipis, arus doktrin ini mulai diarahkan secara khusus kepada kelompok yang sebelumnya terabaikan, yaitu pasukan militer wanita sipil dan organisasi pemuda. Mereka direkrut saat masih sangat muda—gadis-gadis sekolah yang pikirannya masih bersih. Melalui melodi Aikoku Kōshinkyoku yang diputar berulang-ulang dalam latihan baris-berbaris dan upacara pagi, rasa empati para wanita muda ini perlahan dikikis.

Dengan kata lain, Mbaru dididik bukan lagi sebagai tenaga bantuan, melainkan sebagai pasukan garis pertahanan terakhir yang harus siap mati (doktrin bunuh diri/ kamikaze) untuk memperlam-bat laju tentara musuh.

Sehingga, dalam perjalanan militernya, Mbaru sangat terbiasa memegang detonator peledak kemanapun ia pergi. Baginya, alat peledak hanyalah mainan biasa setiap hari. Menyusup dengan membawa pesan militer, dengan prinsip lebih baik mati meledakkan diri bersama musuh daripada menyerah juga jadi bagian kehidupan yang ia jalani di masa itu.

Senjata lain yang digenggam oleh para personel Shindo di medan laga meliputi pedang, senapan, dan bom. Perempuan-perempuan muda ini tidak sekadar diajari cara menembak, tetapi juga dilatih secara khusus untuk merakit bom.

"Tarik sumbu yang melekat di bom tersebut, ketukkan perlahan ke tanah tiga kali, lalu lemparkan (ke arah musuh)," ungkap Mbaru, menjabarkan instruksi mematikan yang masih terekam kuat dalam ingatannya.

"Jika sumbunya ditarik, api langsung keluar. Jadi, sangat berbahaya jika ditahan (tidak segera dilemparkan). Kita bisa mati karena bom itu meledak di tangan sendiri," jelas Mbaru, menggambarkan tipisnya batas antara hidup dan mati saat mengoperasikan senjata tersebut.

Sebelum dinyatakan lulus sebagai laskar Shindo, mereka wajib melewati serangkaian ujian fisik yang menguras stamina. Salah satunya adalah merangkak di atas tanah berbatu hingga tiga kali pengulangan sambil memanggul senjata laras panjang.

Selain ketahanan fisik, para perempuan Shindo juga dituntut memiliki ketangkasan sempurna dalam memegang dan mengaktifkan bom tangan.

"Kami belajar merangkak hingga tiga kali sampai lulus sambil membawa senjata. Kami membungkuk rendah di tanah, sementara senjata diletakkan kokoh di tangan," kenangnya, menggambarkan kerasnya gemblengan militer yang harus dilalui seorang gadis remaja di masa perang.

Mbaru mengisahkan bahwa bom-bom yang dipanggul oleh pasukan Shindo diaktifkan langsung oleh para personel saat perang sengit pecah di Manuk Mulia, Kecamatan Tigapanah, Kabupaten Karo.

Namun, keberanian laskar rakyat ini membentur dinding tebal. Senjata rakitan mereka terbukti tidak berkutik melawan kecanggihan artileri militer Belanda yang datang dengan sokongan bombardir udara secara masif.

"Suara senjata Belanda itu sangat kencang, bunyinya seperti rrrr rrrr rrrr, dan biasanya kedatangan mereka disertai dengan bom serta ledakan di udara yang membubung seperti kembang api," ungkapnya, menirukan riuh rendah desing peluru yang pernah menggetarkan nyalinya.

"Waktu itu seharusnya kami sudah bisa pulang, tetapi kami memutuskan untuk tetap bertahan di sana," kata Mbaru, menegaskan prinsip keteguhan sikap pantang mundur demi martabat tanah leluhur.

Akan tetapi, di era modern ini, pemerintahan Jepang melarang peredaran lagu ini. Jepang bahkan tidak mau mengakui secara resmi tentang lagu tersebut. Saat redaksi mewawancarai salah salah satu jurnalis asal Jepang bernama Atsuro, ia mengatakan bila lagu Aikoku Koshinkyoku tidak diizinkan untuk diputar di Jepang. Memutar dan menyanyikan lagu ini dipublik akan memicu kecaman keras.

MBARU, SAUDARA SEPUPU DJAMIN GINTING YANG PEMBERANI

Salah satu perang paling krusial yang dilalui Mbaru bersama Djamin Ginting adalah pertempuran di Desa Sarinembah. Saat Simpang Empat

dihujani penyerbuan besar-besaran, ketimpangan taktis langsung terlihat sebab 16 tentara yang diberangkatkan oleh Mbaru hanya dibekali enam pucuk senjata api.

"Mau bagaimana lagi, kami hanya bertahan dengan bom tangan yang tersisa. Senjata milik Belanda sangat canggih karena bisa menembak hingga jarak jauh," ungkap Mbaru, merekam keputusasaan di garis depan.

Demi mempertahankan wilayah Kecamatan Tigapanah, Mbaru dan Djamin Ginting selalu berdiri di baris terdepan. Seluruh keluarga besar mereka terpaksa turun tangan secara total dengan membagi peran menjadi kombatan, tim kesehatan, hingga penyuplai logistik.

Ketajaman taktis dan ikatan emosional ini juga terekam saat mereka bertugas di Desa Kutambaru. Di tengah kepungan musuh, Djamin Ginting sengaja mencari Mbaru untuk memastikan keselamatannya, sekaligus mengajarkan taktik bertahan hidup yakni meracik obat sakit perut (norit) dari tempurung kelapa yang dibakar, dipadukan dengan kompres daun binara di atas perut. Bagi Mbaru, sang Pahlawan Nasional bukan sekadar komandan, melainkan sosok saudara pelindung yang selalu menyisir medan laga demi memastikan tidak ada satu pun anggota keluarganya yang gugur atau terluka.

"Ada cerita saat dia datang ke Kutambaru. Saat kami berada di tengah gunung untuk bersembunyi, tiba-tiba dia datang dan saya tidak mengenalinya karena rambutnya sudah sangat panjang. Ternyata, dia mencari saya ke semua tempat," ungkap Mbaru.

Di tengah pelarian, Djamin Ginting membekali laskarnya dengan pengetahuan bertahan hidup. Ia mengajarkan cara meracik obat-obatan dari alam untuk digunakan di medan pertempuran atau selama masa pengungsian. Begitu edukasi taktis itu selesai, sang komandan bersama pasukannya segera bergerak membelah hutan menuju titik palagan lain.

"Dari Kutambaru, dia berangkat lagi ke Sarinembah. Dia pergi bersama abang saya ke Kutacane. Di sanalah awal mula abang saya bertemu dan menikah dengan orang Kutacane," kenangnya.

Peperangan yang berkepanjangan akhirnya memakan korban. Suatu hari, Mbaru menyaksikan kaki Djamin Ginting tertembus peluru panas musuh. Dalam situasi kritis tersebut, abang kandung Mbaru yang bertugas sebagai tim medis tentara langsung bergerak sigap mengevakuasi dan mengobati luka sang jenderal.

Seluruh pengorbanan ini dilakukan Mbaru tanpa pamrih, tanpa bayaran sesen pun.

"Saya dan Djamin Ginting berperang bersama. Dia adalah turang (saudara laki-laki) saya. Bapa Rusti, saudara saya yang lain, juga ikut memanggul senjata bersama kami," tegasnya.

Namun, kontras sejarah itu nyata. Ketika Djamin Ginting dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional pada 7 November 2014, Mbaru hanya ditempatkan sebagai saksi penggiran. Ia diundang ke rumah keluarga besar di Medan dan sekadar menerima selembar kain adat - sebuah kompensasi simbolis yang timpang bagi seorang perempuan yang pernah bertaruh nyawa di garda terdepan Republik.

"Saya juga diundang saat Djamin Ginting diangkat menjadi pahlawan. Saya juga mendapat kain," jelasnya, mengenang seremonial yang berlalu tanpa pengakuan resmi bagi dirinya sendiri.

Setelah seluruh peluh dan darah dikorbankan demi mempertahankan kemerdekaan, Mbaru kini harus menelan pil pahit di ujung usianya. Ia mengaku didera kesedihan yang mendalam karena perjuangannya menguap begitu saja, sepenuhnya diabaikan oleh Pemerintah Republik Indonesia

TAK PERNAH MENERIMA DANA PENSIUN

Kepedihan hati Mbaru memuncak ketika Pemerintah mengumumkan daftar penerima dana pensiun veteran perang. Ia mendapati kenyataan pahit: tunjangan tersebut justru jatuh ke tangan generasi muda yang sama sekali belum pernah bertaruh nyawa di parit pertempuran. Sementara itu, dirinya dan 16 perempuan laskar Shindo yang maju ke garis depan bersama Djamin Ginting justru diabaikan tanpa penghargaan apa pun.

"Abang saya adalah Kepala Sindo. Dia juga tidak mendapat pensiun karena meninggal lebih cepat, tepat setelah perang usai dan situasi sudah aman. Padahal, dia sempat bekerja di kantor camat waktu itu," ungkap Mbaru, menyoroti hilangnya hak administrasi keluarganya.

"Sangat mengecewakan ketika mereka yang masih muda justru mendapat dana pensiun, padahal tidak tahu apa-apa tentang perang. Jumlahnya banyak sekali, saya sampai lupa nama-namanya. Karena itulah kami sempat mendatangi kantor Koramil. Saat itu, saya diminta menyanyikan lagu (mars Jepang) dan semua tentara yang mendengarnya merasa takjub," lanjutnya, merujuk pada pembuktian autentik yang ia lakukan di depan aparat militer lokal.

Luka batin itu terus menganga di sisa usianya. Pengorbanan masa muda yang ia berikan dibalas dengan kelalaian negara.

"Kecewa sekali. Ikut berperang bersama tentara itu sangat melelahkan karena jadwal makan dan minum sama sekali tidak menentu. Kami harus selalu siaga setiap waktu. Kadang baru saja berpikir hendak beristirahat sejenak, kami sudah harus bergerak pindah ke daerah lain," pungkas Mbaru, menutup lembaran kelam yang urung diakui oleh Republik.

TIBA-TIBA DITUDUH PKI

Saat kemerdekaan sudah dalam genggaman dan Mbaru mulai menata hidup bersama keluarga kecilnya, badai politik baru menghantam. Kepala Desa Salit tiba-tiba menuduh suami Mbaru sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pola pembersihan ini menyasar para mantan kombatan yang pernah turun ke medan laga.

"Kami dicap PKI waktu itu. Akibat tuduhan tersebut, banyak saudara dan anak saya yang diberhentikan secara paksa dari pekerjaannya. Putri bungsu saya, Nelsen, juga dipecat," ungkap Mbaru.

Suami Mbaru yang berprofesi sebagai guru sekaligus musisi terpaksa kehilangan mata pencaharian. Demi memulihkan nama baik keluarga, sang suami sempat berjanji akan mengurus seluruh dokumen administratif yang diminta Pemerintah.

Sayangnya, ikhtiar itu kandas karena beberapa kerabat yang ikut membantu proses pembersihan nama tersebut meninggal dunia secara mendadak.

"Suami saya adalah pemain musik yang biasa manggung dari desa ke desa. Namun, oleh kepala desa saat itu, ia dituduh sebagai anggota PKI. Enak saja menuduh seperti itu, kami tidak menerima (keuntungan) apa-apa," tegas Mbaru, menepis fitnah yang meruntuhkan ekonomi keluarganya.

Tragedi ini menyisakan paradoks sejarah yang getir. Di satu sisi ia dicap komunis, tetapi di sisi lain, setiap perayaan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, Mbaru selalu diminta hadir oleh otoritas militer setempat untuk melantunkan lagu-lagu perjuangan kuno.

"Setiap tanggal 17 Agustus, aku selalu diminta menyanyikan lagu kemerdekaan di hadapan para tentara. Saudara sepupu saya kadang meminta pemerintah setempat agar saya menyanyikan lagu perjuangan para Srikandi Indonesia," kata Mbaru. Rekam jejak suaranya justru menjadi legitimasi heroisme yang paradoks dengan stigmanya.

"Suara senjata Belanda itu sangat kencang, bunyinya seperti rrrr rrrr rrrr, dan biasanya kedatangan mereka disertai dengan bom serta ledakan di udara yang membubung seperti kembang api," ungkapnya, menirukan riuh rendah desing peluru yang pernah menggetarkan nyalinya.

JANJI YANG GUGUR BERSAMA WAKTU

Mbaru mengungkapkan bahwa saudara-saudara lakinya sempat berjanji akan mengurus hak dana pensiun veteran yang seharusnya ia dapatkan. Namun, seiring waktu berlalu, harapan itu pupus. Satu per satu orang yang berniat menolongnya wafat, termasuk Djamin Ginting.

Sang jenderal legendaris Karo tersebut meninggal dunia pada 23 Oktober 1974 di Ottawa, Kanada, saat menjalankan tugas diplomatik dari Presiden Soeharto. Kepergian Djamin Ginting mengunci rapat-rapat peluang Mbaru untuk mendapatkan pengakuan administratif dari negara yang pernah ia bela.

Misi Kemanusiaan Karo Foundation Menjemput Kehormatan Mbaru Beru Ginting Sang Wanita Inteligen Yang Terlupakan

Oleh : Elitha Evinora beru Tarigan

Di balik garis wajahnya yang legam dimakan satu abad usia, Mbaru beru Ginting menyimpan sepenggal sejarah berdarah Republik ini. Perempuan asal Kuta Salit tersebut kini telah menginjak usia 102 tahun. Sepanjang hidupnya yang panjang, ia memilih sunyi - tidak pernah menuntut sepeser pun pamrih atas peluru yang pernah ia hindari demi tegaknya kemerdekaan Indonesia yang dicintai.

Keberadaan Mbaru yang selama ini tersembunyi mengejutkan banyak pihak, tidak terkecuali Letjen TNI (Purn) Musa Bangun. Ketua Umum Karo Foundation tersebut mengaku terhenyak saat mengetahui ada seorang intelijen perempuan asal Tanah Karo yang luput dari catatan negara. Padahal, ia pernah bertaruh nyawa di garis depan, bergerak dalam senyap bersama Pahlawan Nasional sekelas Djamin Ginting.

"Dia sangat istimewa," ujar Musa Bangun dengan tatapan serius saat ditemui di kantor Karo Foundation kawasan Jakarta Pusat, 29 Juli 2026. "Dalam dunia militer, tugas intelijen itu artinya 'siap mati'. Sangat jarang ada pasukan intel perempuan di masa itu. Jabatannya jelas sebuah keistimewaan.

"Bagi Musa Bangun, sosok Mbaru adalah fenomena sejarah yang amat berharga. Namun ironisnya, alih-alih mendapat penghargaan, masa lalu Mbaru dan keluarganya justru sempat diselimuti awan kelam akibat stigma politik masa lalu. Musa menegaskan bahwa nama baik Mbaru harus segera dibersihkan. Menembus barisan musuh sebagai intelijen bukanlah perkara mudah, dan loyalitasnya pada negara tidak boleh digugurkan oleh prasangka sepihak.

Musa Bangun dan Karo Foundation bergerak cepat menyelamatkan sejarah yang nyaris terkubur.

Melalui Karo Foundation, Musa Bangun kini gigih mendorong pemerintah agar nama Mbaru beru Ginting masuk dalam daftar veteran resmi Indonesia. Ketulusan Mbaru yang tidak pernah menuntut haknya justru menjadi alasan kuat mengapa negara harus datang menjemputnya dengan penghormatan tertinggi di sisa usianya.

UTANG KEHORMATAN DI UJUNG USIA: GERAKAN MUSA BANGUN DAN KARO FOUNDATION BERBURU VETERAN TAK BERNAMA

Langkah taktis yang diinisiasi oleh Musa Bangun dan Karo Foundation ini segera memantik resonansi yang lebih luas. Ernalem Beru Bangun, seorang Antropolog dari Universitas Pertahanan, melihat kasus Mbaru sebagai puncak gunung es dari nasib para perempuan pejuang Karo yang kerap menjadi "pasukan tak bernama" dalam lembar sejarah.

Menurut Ernalem, budaya patrilinear yang mengakar kuat sering kali membuat peran kepahlawanan perempuan tenggelam di bawah bayang-bayang kaum pria.

"Karakter perempuan Karo itu selalu berbuat yang terbaik tanpa pamrih. Itu sebabnya banyak sekali perempuan pejuang kita yang belum mendapatkan penghargaan," ungkap Ernalem.

Oleh karena itu, Ernalem menyerukan kepada seluruh masyarakat Karo untuk tidak lagi diam, harus berani bersuara. Ia mendukung penuh gerakan Karo Foundation untuk menjadi wadah kolektif dalam menjaring data para pejuang sepuh yang masih hidup agar pemenuhan syarat administrasi mereka bisa segera direalisasikan ke tingkat pusat.

Melalui Karo Foundation, Musa Bangun kini gigih mendorong pemerintah agar nama Mbaru beru Ginting masuk dalam daftar veteran resmi Indonesia. Ketulusan Mbaru yang tidak pernah menuntut haknya justru menjadi alasan kuat mengapa negara harus datang menjemputnya dengan penghormatan tertinggi di sisa usianya.



Musa Bangun berbicara banyak tentang Mbaru beru Ginting saat ditemui langsung di kantornya di Jakarta (Fotografer Elitha Evinora beru Tarigan).

Perjuangan ini bukan sekadar urusan selembar kertas SK Veteran atau tunjangan masa tua. Ini adalah momentum mendobrak diskriminasi sunyi yang selama ini dialami perempuan Karo dalam kehidupan sosial.

Di ujung usia Mbaru beru Ginting, ada sebuah utang kehormatan bangsa yang harus dituntaskan. Sebuah pembuktian bagi generasi muda bahwa perempuan Karo bukan sekadar saksi di balik layar, melainkan barisan pemberani yang ikut merajut tenun kemerdekaan Indonesia.

“Pada dasarnya banyak sekali perempuan Pejuang kita yang belum mendapatkan penghargaan (memang itulah karakter perempuan Karo yang selalu berbuat yang terbaik tanpa pamrih). Tapi kita ingin agar di akhir hidup mereka, ada kebanggaan yang juga memberikan motivasi bagi masyarakat Karo bahwa perempuan Karo itu pemberani,” tandasnya.*

Terasing di Rumah Sendiri: Nasib Perempuan Karo di Bawah Dominasi Patriarki

Editor: Elitha Evinora beru Tarigan



Oleh: Dr. Ernalem Bangun
Dosen Universitas Pertahanan

Kepada Redaksi yang terhormat, izinkan saya membagikan sebuah refleksi mendalam mengenai akar budaya dan sejarah yang berjalan sunyi di Tanah Karo. Menatap keberadaan sosok Titing, Mbaru br Ginting, ingatan kolektif kita seolah ditarik kembali pada esensi karakter asli perempuan Karo zaman dahulu. Mereka adalah perwujudan nyata dari empat pilar kehidupan: mehamat (hormat), metami (lemah lembut), menande (keibuan), dan merawa (tegas/berani). Karakter-karakter inilah yang mendasari setiap peluh yang mereka teteskan, mengalir dalam ketulusan yang murni tanpa pernah menuntut balasan maupun penghargaan.

Kondisi sosiologis ini diperkuat oleh sistem kekerabatan patrilineal yang kita anut. Ketika seorang singuda-nguda (gadis) menikah, ia melangkah sepenuhnya menjadi bagian dari keluarga suaminya. Keberadaannya menjelma sebagai "si rukat nakan" - sang penyedia nasi, pelayan setia bagi suami dalam sunyinya keseharian. Namun, struktur adat menyimpan sekat yang begitu tebal. Setinggi apa pun prestasi seorang perempuan, ia tidak memiliki ruang untuk menggantikan suaminya dalam berbagai aktivitas formal adat Karo, khususnya runggu (musyawarah).

Sepanjang sejarah adat kita, belum pernah ada runggu yang dipimpin oleh wanita. Perempuan hadir hanya sebagai penyokong kokoh di balik layar. Mereka merencanakan dan mempersiapkan segalanya dengan detail, tetapi kaum laki-laki yang akan tampil ke permukaan untuk mengekspos semua hasil kerja keras tersebut.

Ketimpangan peran ini terlihat nyata dalam tradisi rumah tangga di pedesaan. Sejak fajar menyingsing, perempuan Karo mengerjakan semua pekerjaan seperti mengurus keperluan anak-anak, membersihkan rumah, hingga mencangkul di juma (ladang). Sebaliknya, sudah menjadi pemandangan biasa jika kaum laki-laki memulai hari dengan pergi ke kedai kopi, lalu ke ladang membantu seadanya.

Begitu musim panen tiba, barulah kaum laki-laki hadir untuk membawa hasil ke pasar, dan uang hasil panen diberikan kembali ke rumah sepenuhnya sesuai keinginan suaminya. Hingga hari ini di desa-desa, masih sangat jarang ditemukan laki-laki yang mau mengerjakan pekerjaan domestik atau mengurus anak.

Namun ajaibnya, keberhasilan keluarga selalu disematkan sebagai karya para suami, dan masyarakat Karo menerima realitas ini dengan senang hati. Begitu tingginya rasa mehamat perempuan Karo terhadap laki-laki, hingga mereka rela memberikan seluruh panggung kehormatan kepada kaum pria.

Jika dunia Barat mengenal istilah "ladies first", maka di Tanah Karo berlaku sebaliknya: "man first", di mana laki-laki selalu didahulukan, termasuk dalam urusan makan.

Sifat *nerimo* dan ketulusan yang terlampau sunyi ini pula yang melatarbelakangi mengapa peran besar perempuan Karo dalam dunia perjuangan kemerdekaan sering kali terlupakan. Begitu banyak perempuan Karo yang bertaruh nyawa sebagai perawat, intel (mata-mata), penghubung pesan, hingga juru masak di garis depan, namun mereka tidak mendapatkan penghargaan yang layak.

Dunia boleh melupakan, tetapi lembar sejarah menolak amnesia. Peran heroik wanita Karo dalam merebut kemerdekaan RI tidak perlu diragukan lagi. Mary Margaret Steedly, seorang antropolog asing, dalam bukunya *Reports, a Story of Indonesian Independence*, dengan gamblang menguraikan keberanian luar biasa perempuan Karo yang melakukan berbagai cara nekat demi meraih kemerdekaan yang mereka dambakan. Miss Mary menuliskan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian lapangannya di Kota Medan dan Tanah Karo pada tahun 1993-1996.

Zaman boleh berubah menuju modernitas, namun kisah si rukat nakan yang memendam lelah di balik senyum mehamat-nya akan selalu menjadi jiwa dari Tanah Karo. Perjuangan mengembalikan hak mereka memang panjang, tetapi mengabaikan sejarah mereka adalah sebuah kelalaian budaya yang harus kita sudahi bersama.*

Mary Margaret Steedly, seorang antropolog asing, dalam bukunya Reports, a Story of Indonesian Independence, dengan gamblang menguraikan keberanian luar biasa perempuan Karo yang melakukan berbagai cara nekat demi meraih kemerdekaan yang mereka dambakan. Miss Mary menuliskan hal tersebut berdasarkan hasil penelitian lapangannya di Kota Medan dan Tanah Karo pada tahun 1993-1996.

Ciptakan Generasi Melayani, Karo Foundation Biayai Penuh Pemuda Karo Kuliah Pariwisata ke Bali

Editor: Elitha Evinora beru Tarigan



Penerima beasiswa Karo Foundation saat ini sudah tiba di Bali (Foto: Analgin Ginting/Editor: Elitha Evinora beru Tarigan)

Oleh: Analgin Ginting
Sekretaris Umum KF

Bumi Turang tidak pernah ingkar janji soal keindahan. Di bawah kepungan hawa sejuk puncak Gundaling dan kokohnya siluet Gunung Sinabung, Taneh Karo Simalem membentang bagai sekeping surga yang diberkahi alam dan keluhuran budaya.

Namun, pesona elok ini menyimpan sebuah ironi yang membeku di balik pintu-pintu hotel berbintang di Berastagi. Jika kita jeli mengamati deretan pelayan restoran (*waiter*), petugas kebersihan, hingga penerima tamu di garda depan, sebuah pertanyaan getir akan menyelinap: mengapa hampir tidak ada anak muda sedarah Karo yang berdiri melayani di sana?

Langkah besar ini bermula dari sebuah perenungan dan dialog mendalam bersama Ketua Umum Karo Foundation. Kami gelisah memikirkan satu hal yaitu alasan mengapa anak-anak kandung Karo hanya jadi penonton di tengah gempuran industri pariwisata yang tumbuh raksasa saat ini.

Suku asli Karo seakan terputus dari standar profesionalisme industri keramahtamahan (hospitality) modern karena kendala kompetensi formal.

Karo Foundation menolak tinggal diam melihat ketertinggalan sumber daya manusia (SDM) lokal tersebut. Dari rahim kegelisahan itulah, sebuah gerakan beasiswa pariwisata lahir.

Visi yang diusung sangat bersahaja namun mendalam: menempa kembali pemuda Karo agar memiliki karakter "Generasi Melayani" yang profesional dan hangat (hospitable), sekaligus mengembalikan kedaulatan mereka sebagai tuan rumah yang disegani di rumahnya sendiri.

MERAJUT ASA DARI DENPASAR KE RAHIM BUMI TURANG

Benih perubahan itu telah ditanam sejak tahun 2025. Satu orang putra daerah terbaik telah dilepas menyeberangi pulau untuk mereguk ilmu pariwisata langsung di episentrumnya yaitu Bali.

Pemuda Karo itu sebentar lagi akan menyelesaikan studi diploma satu (D-1) Pariwisata, dan dijadwalkan membawa pulang toganya pada September 2026 mendatang.

Keberhasilan di tahun pertama menyalakan api optimisme yang lebih membara. Memasuki gerbang tahun 2026, Karo Foundation memperlebar kepak sayapnya. Kesempatan emas ini kini dianugerahkan kepada tiga orang pemuda tangguh yang aktif menakhodai Karang Taruna desa di berbagai pelosok Kabupaten Karo.

Akar rumput inilah yang ingin disentuh. Agar para tunas muda ini dapat belajar dengan tenang tanpa didera cemas, Karo Foundation mengulurkan tangan dengan membiayai seluruh kebutuhan mereka melalui beasiswa penuh (*full scholarship*):

- Biaya Pendidikan Penuh selama satu tahun di bangku kuliah D-1 Pariwisata, Denpasar, Bali.
- Uang Saku Bulanan untuk menopang napas kehidupan selama masa studi.
- Biaya Tempat Tinggal (Indekos) sebagai rumah bernaung di tanah rantau.

Kendati demikian, beasiswa ini bukanlah hadiah cuma-cuma untuk melarikan diri dari daerah. Ada janji suci dan syarat mutlak yang mengikat pundak mereka yaitu: setelah lulus, mereka wajib pulang. Mereka harus kembali ke rahim Bumi Turang untuk menularkan standar pelayanan dunia, menggerakkan roda ekonomi, dan menjadi pelopor kebangkitan pariwisata lokal.

MEMANGGIL KEPEDULIAN EKOSISTEM DAERAH

Melahirkan generasi yang cakap tentu tidak bisa bertumpu pada ketukan palu satu yayasan saja. Karo Foundation menyadari bahwa mimpi besar ini hanya akan mewujud nyata jika dirajut dengan semangat - sebuah gotong royong yang padu dari seluruh elemen di Kabupaten Karo:

1. Pemerintah Kabupaten Karo dan Kepala Desa (Pengulu): Dukungan penuh dan restu dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo sangat dinantikan demi keberlanjutan investasi manusia ini. Di tingkat akar rumput, keaktifan para kepala desa untuk mengetuk pintu-pintu pemuda Karang Taruna di sudut desa menjadi lentera penghubung agar peluang berharga ini tidak lewat begitu saja.
2. Pelaku Usaha Pariwisata (Hotel, Restoran, dan Destinasi): Sinergi nyata dari para pemilik modal dan pengelola industri wisata di Kabupaten Karo adalah muara dari program ini. Karo Foundation mengetuk pintu keterbukaan para pelaku usaha untuk menyambut kepulangan para alumni Bali ini dengan menyediakan ruang kerja yang layak dan setara.

Saat niat tulus Karo Foundation berkelindan dengan ketegasan komitmen pemerintah, keaktifan pemuda desa, serta pelukan hangat dari pelaku industri, maka fajar baru pariwisata Karo sedang menyingsing.

Lahirnya generasi baru Karo yang ramah dan profesional bukan lagi sekadar angan yang melayang di awang-awang, melainkan fondasi kokoh yang siap menyambut dunia di Taneh Karo Simalem.

Ujian Sesungguhnya Tol Medan-Berastagi

Studi kelayakan harus menguji manfaat, risiko, dan beban fiskal, bukan sekadar menjadi stempel administratif menuju konstruksi.



Oleh : Dr. Iskandar Purba
Pengajar Teknik Sipil Institut Teknologi PLN

Rencana Jalan Tol Medan-Berastagi memasuki tahap lebih serius. Setelah prastudi kelayakan atau pra-FS diprakarsai Karo Foundation, dimulainya proses studi kelayakan atau feasibility study (FS) oleh PT Hutama Karya (Persero) menandai pergeseran menuju penyiapan proyek yang lebih terukur. Bagi masyarakat yang lama menghadapi kemacetan dan kerawanan di koridor ini, perkembangan tersebut patut disambut.

Namun, FS bukan izin otomatis untuk membangun. Ia harus memastikan apakah jalan tol dengan trase yang diusulkan benar-benar merupakan jawaban paling aman, efektif, dan bertanggung jawab secara fiskal atas persoalan konektivitas Medan-Berastagi.

Urgensi Koridor, Bukan Pembenaran Otomatis

Jalan Tol Medan-Berastagi bukan sekadar proyek jalan. Ia adalah infrastruktur strategis yang menghubungkan kawasan metropolitan Medan dengan wilayah tengah Sumatera Utara, khususnya Kabupaten Karo dan kawasan sekitar Danau Toba hingga kawasan yang terhubung ke Aceh Tenggara dan Subulussalam. Koridor ini selama ini menjadi jalur utama mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan hortikultura, pariwisata, logistik, serta akses antarwilayah. Ketika lalu lintas padat, waktu tempuh sulit diprediksi. Tikungan, lereng, cuaca, dan potensi longsor turut meningkatkan risiko keselamatan.

Meski demikian, kebutuhan memperbaiki konektivitas tidak otomatis membenarkan satu pilihan proyek. FS harus membandingkan jalan tol dengan alternatif seperti peningkatan jalan nasional, jalan pintas pada titik kemacetan, penanganan lereng dan drainase, serta manajemen lalu lintas. Jika tol terbukti paling unggul, keputusan itu harus lahir dari perbandingan manfaat, biaya, dan risiko yang dapat diperiksa.

Ruas ini tercantum dalam Keputusan Menteri PUPR Nomor 367/2023 tentang Rencana Umum Jaringan Jalan Nasional Tahun 2020-2040. Rencana awal sepanjang sekitar 66,3 kilometer terbagi menjadi Tanjung Morawa-Pancur Batu, Pancur Batu-Sibolangit, dan Sibolangit-Sempajaya/Berastagi. FS perlu menentukan segmen yang paling bermanfaat, siap dibangun, serta efektif mengurangi kemacetan dan risiko keselamatan.

Angka Awal dan Kelayakan

Pra-FS memperkirakan kebutuhan lahan sekitar 350 hektare dan biaya investasi awal Rp26,34 triliun. Angka tersebut bukan angka final. Perubahan harga tanah, material, pembiayaan, dan trase dapat menggeser kebutuhan lahan, panjang jembatan, volume galian, serta biaya pengamanan lereng secara berarti.

Koridor ini bergerak dari kawasan relatif datar menuju perbukitan. Kajian geologi, geoteknik, hidrologi, drainase, kestabilan lereng, dan struktur jembatan harus ditopang data memadai. Biaya pemeliharaan sepanjang umur layanan juga wajib dihitung; trase yang murah ketika dibangun dapat menjadi mahal jika terus memerlukan penanganan lereng.

Proyeksi lalu lintas harus memakai survei asal-tujuan terbaru, kemampuan membayar tarif, pola pariwisata, dan arus angkutan barang. FS juga perlu menguji skenario ketika biaya meningkat, pengadaan tanah terlambat, atau volume kendaraan tidak mencapai perkiraan.

Pra-FS mencatat tingkat pengembalian ekonomi internal (EIRR) 17,16 persen dan tingkat pengembalian finansial internal (FIRR) 7,33 persen. Artinya, manfaat publik diperkirakan kuat, tetapi imbal hasil proyek lebih terbatas. Jika dukungan pemerintah diperlukan, bentuk dan besarannya harus transparan, efisien, menjaga tarif tetap wajar, serta tidak sekadar memindahkan beban ke neraca BUMN.

Lima Ujian untuk Studi Kelayakan Setidaknya ada lima pertanyaan yang harus dijawab secara tegas.

Pertama, apakah trase terpilih memberi keseimbangan terbaik antara waktu tempuh, keselamatan, biaya, dan risiko konstruksi?

Kedua, apakah permintaan lalu lintas tetap kuat pada tarif yang terjangkau dan dalam skenario pertumbuhan yang lebih rendah?

Ketiga, apakah dampak terhadap aliran air, lereng, lahan pertanian, permukiman, dan mata pencaharian dapat dikelola secara adil?

Keempat, skema pembiayaan apa yang paling tahan terhadap perubahan biaya dan paling efisien menggunakan dukungan publik?

Kelima, bagaimana proyek dilaksanakan bertahap dan akuntabel? Ringkasan eksekutif FS semestinya dibuka agar asumsi serta alasan keputusan dapat dipahami publik.

Manfaat bagi Wilayah

Manfaat tol tidak berhenti pada badan jalan. Simpang susun, jalan penghubung, terminal logistik, dan kawasan istirahat harus terhubung dengan sentra hortikultura, pasar, destinasi wisata, dan usaha lokal. Tanpa itu, tol hanya mempercepat kendaraan melintas sementara pusat produksi tetap menghadapi hambatan.

Tarif yang terlalu tinggi dapat membuat truk, bus, dan pengguna harian tetap memilih jalan lama. Akibatnya, pendapatan tol tidak tercapai dan kemacetan tidak banyak berkurang. Keterjangkauan tarif harus menjadi bagian dari desain proyek.

Masyarakat yang lahannya terdampak juga harus memperoleh informasi jelas, penilaian adil, dan ruang menyampaikan keberatan. Kelayakan sosial bukan lampiran kelayakan teknis; ia menentukan legitimasi dan kelancaran proyek.

Studi Kelayakan Bukan Formalitas

Hasil terbaik FS tidak selalu berupa lampu hijau bagi rancangan awal. Perubahan trase, pembangunan bertahap, peningkatan jalan eksisting, atau penyesuaian pembiayaan bukanlah kegagalan. Itulah bukti bahwa perencanaan berfungsi sebelum keputusan mahal dan sulit dibalik diambil. Momentum Tol Medan-Berastagi perlu dijaga. Namun, kemajuan harus diukur dari ketepatan memilih solusi berdasarkan bukti, bukan dari bertambahnya dokumen. Infrastruktur strategis menuntut keberanian mengoreksi rencana sebelum konstruksi.*

Babak Baru RSUD Kabanjahe: Segera Pindah ke Gedung Baru, Kompleks Lama

Oleh : Elitha Evinora beru Tarigan

Sengketa lahan RSUD Kabanjahe resmi berakhir damai melalui rapat koordinasi final yang digelar di Kantor Bupati Karo pada 6 Agustus 2026. Rapat ini mengesahkan kesepakatan transisi aset sah milik Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) tanpa mengorbankan pelayanan kesehatan masyarakat.



Ilustrasi : Jerrycho Sinulingga

Bupati Karo, Antonius Ginting, bersama jajaran Moderamen GBKP menutup lembaran polemik agraria ini dengan komitmen kolaborasi ke tingkat pusat.

Duduk perkara konflik ini bukanlah rahasia baru. RSUD Kabanjahe, benteng utama penyembuhan masyarakat Karo, berdiri di atas "tanah umat" milik sah Moderamen GBKP. Masa sewa pakai lahan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo telah kedaluwarsa sejak dua tahun lalu.

Ketika dinamika surat-menyurat menemui jalan buntu, pihak gereja melayangkan somasi resmi pada Juni 2026. Di luar ruangan, narasi liar bergulir bebas bahwa tuduhan bahwa Pemkab menolak mengembalikan aset hingga isu pemakaian paksa sampai tahun 2031.

Alih-alih membawa sengketa ini ke meja hijau pengadilan yang melelahkan, Bupati Karo, Antonius Ginting, memilih membuka lebar pintu komunikasi. Pihak Moderamen GBKP yang diwakili oleh Sekretaris Umum Pdt. Yunus Bangun, bersama tim hukumnya, hadir membawa semangat rekonsiliasi.

Dalam rapat final pada 6 Agustus 2026 ini, Bupati Antonius Ginting memaparkan langkah konkret yang sedang dikerjakannya. Ia mengatakan bila Pemkab Karo tidak diam dan telah bergerak cepat menemui Menkes RI demi mengamankan surat rekomendasi ke Presiden Republik Indonesia guna mempercepat pendanaan gedung RSUD yang baru.

Moderamen GBKP juga menyatakan komitmennya untuk tidak hanya memberikan kelonggaran waktu transisi demi kepentingan pasien, tetapi juga siap berjalan beriringan mendampingi Bupati Karo beraudiensi ke Jakarta.

Institusi gereja dan eksekutif daerah sepakat bersama-sama mendatangi Kemenkes, Sekned, hingga Presiden RI untuk mengawal percepatan pembangunan fisik rumah sakit pengganti.

"Ini adalah bentuk pelayanan bersama. Ketika kepentingan masyarakat luas diletakkan di atas ego masing-masing, maka solusi yang bermartabat pasti tercapai," ungkap salah satu pengurus gereja di sela-sela berakhirnya rapat.

Berdasarkan kesepakatan formal dalam rapat koordinasi tanggal 6 Agustus 2026, pemerintah Kabupaten Karo berkomitmen untuk menyerahkan aset RSUD Kabanjahe kepada Moderamen GBKP sepenuhnya paling lambat pada 31 Desember 2027.

Berdasarkan pertemuan resmi antara Pemkab Karo dan jajaran Moderamen GBKP, proses pemindahan operasional ke fasilitas baru akan dilakukan secara bertahap dengan lini masa sebagai berikut:

1. Agustus 2027: Pembangunan fisik dan finishing gedung RSUD baru di Desa Rumah Kabanjahe dan Desa Lingga ditargetkan selesai penuh. Proses pemindahan peralatan medis dan sarana pendukung juga dimulai pada bulan ini.

2. Minggu ke-3 Desember 2027: Pemkab Karo dijadwalkan selesai memindahkan seluruh operasional medis dan mengosongkan kompleks RSUD di Jalan Selamat Ketaren Kabanjahe.

3. 31 Desember 2027: Penyerahan seluruh gedung dan bangunan lama serta bangunan tambahan milik Pemkab Karo diserahkan secara resmi untuk dikelola sepenuhnya oleh Moderamen GBKP sesuai mekanisme peraturan yang berlaku.

RUMAH SAKIT BARU AKAN DIBANGUN DI DESA LINGGA DAN RUMAH KABANJAHE

Pemerintah kini sedang berpacu dengan waktu membangun fasilitas RSUD yang baru dan modern di perbatasan Desa Rumah Kabanjahe dan Desa Lingga. Proyek ini ditargetkan selesai fisik pada Agustus 2027, sehingga proses pindahan dan pengurusan izin bisa rampung pada Desember 2027.

Setelah komplek lama diserahkan kembali, Moderamen GBKP dikabarkan tidak akan membiarkan tempat itu kosong. Pihak gereja berencana menghidupkan kembali rumah sakit swasta Kristen di sana.

Untuk mewujudkan fasilitas medis yang andal, GBKP merancang kemitraan strategis dengan jaringan rumah sakit Murni Teguh Memorial Hospital. Kolaborasi ini diharapkan mampu menghadirkan rumah sakit rujukan dengan fasilitas modern dan tenaga medis spesialis di Kabanjahe.

SEJARAH PERAN AWAL GBKP DALAM MEDIS KABANJAHE

Perdamaian yang tercapai pada Agustus 2026 ini sejatinya merawat akar sejarah yang sangat dalam. Keterikatan GBKP dengan dunia kesehatan di Tanah Karo bukanlah hubungan sewa-menyewa biasa, melainkan sebuah warisan kemanusiaan yang panjang, yaitu:

1. Era Penginjilan (NZG)

Jauh sebelum Indonesia merdeka, para misionaris dari *Nederlandsch Zendelinggenootschap* (NZG) yang membidani lahirnya GBKP, memandang pelayanan medis sebagai pilar utama pengabdian sosial, selain pendidikan dan spiritual.

2. Perintis Layanan Kesehatan

Pada awal abad ke-20, kompleks medis di Kabanjahe didirikan oleh para tokoh gereja terdahulu untuk menanggulangi wabah penyakit di dataran tinggi Karo, menjadikannya salah satu pusat penyembuhan modern pertama di wilayah tersebut.

3. Penyerahan Pengelolaan

Pasca-kemerdekaan, demi memperluas jangkauan layanan ke seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang, GBKP menyerahkan pengelolaan operasional rumah sakit kepada pemerintah daerah, dengan tetap mempertahankan hak kepemilikan tanah sebagai komitmen historis umat.*

Mengubah Wacana Menjadi Karya: Panggilan Kolaborasi Karo Foundation Guna Pesikap Kuta Kemulihenta

Editor : Elitha Evinora beru Tarigan



Oleh : Analgin Ginting
Sekretaris Umum KF

Rindu pada kampung halaman sering kali menguap begitu saja dalam bentuk retorika. Bagi masyarakat diaspora, membicarakan tanah kelahiran di kedai kopi atau ruang digital adalah hal biasa. Namun, transformasi sejati Tanah Karo tidak bisa tegak hanya dengan narasi kerinduan yang pasif. Wilayah subur di Sumatra Utara ini membutuhkan cetak biru yang terukur, dedikasi sumber daya manusia, serta komitmen eksekusi yang nyata.

Kesadaran kolektif itulah yang melatari berdirinya Karo Foundation (KF) di Jakarta. Digawangi oleh tujuh tokoh deklarator diantaranya Barata Brahmana dan Letnan Jenderal (Purn) Musa Bangun-lembaga ini hadir sebagai wadah kolaboratif strategis. Misinya tunggal: memajukan peradaban Karo secara komprehensif.

Perlu anda ketahui, Karo Foundation itu bergerak di atas landasan filosofis yang mengakar kuat: Si pesikap kuta kemulihenta, sebuah frasa bahasa Karo yang berarti "mari kita benahi kampung halaman kita". Kendati demikian, visi besar ini menuntut perubahan paradigma yang mendasar. Kepedulian tidak boleh lagi berhenti sebagai pemanis diskusi, melainkan harus bermutasi menjadi keterlibatan aktif yang terorganisasi.

ENAM PILAR ARSITEKTUR STRATEGIS

Guna memastikan setiap kontribusi berjalan sistematis dan berdampak jangka panjang, Karo Foundation merancang enam pilar program kerja yang saling menopang. Struktur ini menjadi kompas organisasi dalam mengeksekusi perubahan:

- Pilar Peradaban, Budaya, dan Aksara Karo: Merawat akar identitas, melestarikan nilai-nilai luhur, dan merevitalisasi warisan literasi serta aksara Karo agar tetap relevan bagi generasi mendatang.
- Pilar Pendidikan dan Pembanguan SDM: Meningkatkan kapasitas talenta lokal melalui akses pendidikan berkualitas, pelatihan keterampilan masa depan, dan pembinaan karakter.
- Pilar Infrastruktur dan Kepemimpinan: Mendorong tata kelola kawasan yang lebih baik serta melahirkan kader-kader pemimpin Karo yang berwawasan luas dan berdaya saing global.
- Pilar Usaha, Wiraswasta, dan UMKM: Membangun ekosistem ekonomi kerakyatan, memfasilitasi akses modal, serta melakukan pendampingan bisnis skala kecil-menengah agar mandiri dan berdaya tahan.
- Pilar Media Offline dan Online: Membangun saluran komunikasi modern yang efektif untuk menyebarkan narasi positif, edukasi, dan transparansi program kerja.
- Pilar Hubungan Kelembagaan dan Inovasi: Menggalang sinergi lintas sektor-pemerintah, akademisi, swasta, dan komunitas-guna melahirkan inovasi berbasis solusi bagi Karo.

REALITAS LAPANGAN DAN TANTANGAN SUMBER DAYA

Namun, perencanaan yang matang dan struktur pilar yang solid memerlukan mesin penggerak utama: sumber daya manusia (SDM) yang berfokus penuh dan siap bekerja ekstra. Di sinilah tantangan sesungguhnya bermula.

Saat ini, puluhan nama memang telah terdaftar dalam struktur pilar program. Namun, realitas di lapangan menunjukkan pemandangan yang berbeda. Jumlah individu yang benar-benar bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya secara intensif demi eksekusi program masih sangat terbatas. Gagasan besar dan potensi dana melimpah tidak akan pernah terwujud tanpa ketersediaan SDM yang mengekse-kusinya secara konsisten.

Sebab itu, Karo Foundation memanggil seluruh potensi SDM Karo - Merga Silima dan jaringan keluarga besar Karo di mana pun berada - yang memiliki panggilan nurani untuk berpindah dari tataran wacana ke dalam aksi konkret.

MENCARI KARAKTER PEMIMPIN MASA DEPAN

Pintu Karo Foundation kini terbuka lebar bagi mereka yang siap berkontribusi. Namun, lembaga ini menetapkan standar integritas yang tinggi bagi para calon penggeraknya:

- Kerja Keras: Memiliki daya tahan tinggi dan komitmen untuk menyelesaikan pekerjaan hingga tuntas.
- Jujur dan Berintegritas: Memegang teguh prinsip moralitas serta keterbukaan dalam setiap tindakan.
- Tanpa Pamrih: Memiliki kepedulian murni untuk memberi dampak positif, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi (*vested interest*) atau ekspektasi imbalan personal.
- Berakar pada Filosofi Karo: Menjadikan nilai-nilai kebersamaan dan kehormatan adat sebagai kompas moral dalam bertindak.

SAATNYA MENGAMBIL PERAN "SISAMPAT-SAMPATEN"

Kemajuan Karo tidak akan pernah datang dari luar, melainkan dari keberanian anak-anak daerahnya untuk saling menopang. Prinsip sisampat-sampaten (saling membantu dan bergotong royong) adalah modal sosial terbesar yang dimiliki oleh masyarakat Karo.

Kesadaran kolektif itulah yang melatari berdirinya Karo Foundation (KF) di Jakarta. Digawangi oleh tujuh tokoh deklarator-di antaranya Barata Brahmana dan Letnan Jenderal (Purn) Musa Bangun-lembaga ini hadir sebagai wadah kolaboratif strategis. Misinya tunggal: memajukan peradaban Karo secara komprehensif.

Jika Anda adalah pribadi yang memegang teguh integritas, memiliki keahlian profesional, dan siap bekerja nyata demi kemajuan Tanah Karo, mari melangkah bersama Karo Foundation. Ini adalah ruang bagi mereka yang tidak hanya ingin melihat perubahan, tetapi memilih untuk menjadi bagian dari perubahan itu sendiri.*



Ilustrasi : Jerry Sinulingga

Strategi Karo Lautan Api dari Sang Mayor

Oleh : Elitha Evinora beru Tarigan

Sejarah nasional selama ini menempatkan peristiwa Bandung Lautan Api (Maret 1946) sebagai satu-satunya simbol pembumi-hangusan kota paling masif demi mempertahankan kemerdekaan. Namun, para penulis lupa bila pengorbanan yang sama juga terjadi di Utara Sumatera yang dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama 'Karo Lautan Api'.

November 1947 jadi tahun yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat Karo. Di tahun itu, ribuan unit bangunan super megah berbahan dasar kayu yang dikenal dengan nama Rumah Siwaluh Jabu. Ini bukan rumah adat biasa sebab rumah ini dibangun dengan pondasi dari kayu-kayu tua pilihan dan berkualitas tinggi, beratap ijuk tebal, tinggi dan tanpa dirakit dengan paku tunggal setitik pun. Rumah ini dihuni oleh 8 anggota keluarga, dan menjadi satu dari 4 rumah adat tertinggi dan terbesar di Indonesia.

Selain itu juga ada Rumah Adat Biasa, Rumah dan Gedung dari batu yang ditempati para pedagang dan Belanda, sekolah, stasiun militer, kantor-kantor yang musnah hanya dalam hitungan jam saja.

Jumlahnya di atas 4.000 unit, belum ada yang membahasnya secara detail. Akan tetapi, tulisan ini akan membuka mata dunia tentang situasi yang tidak pernah dipahami oleh Orang Karo.

Kini, hanya beberapa rumah saja yang tertinggal dan tidak musnah dilalap api. Edisi ini, saya akan memuat detik demi detik, hari demi hari sejarah awal perjuangan Orang Karo hingga rela memusnahkan rumahnya sendiri demi Bangsa Tercinta, Indonesia.

KONDISI IBUKOTA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1947 DAN JALUR KOMANDO MILITER DI TANEH KARO

Di tahun 1946 secara administratif luas wilayah Karo tidak sesempit yang anda lihat sekarang, dimana laporan media hanya mengatakan kota Berastagi dan Kabanjahe serta ratusan desa saja yang dibakar oleh warganya sendiri demi mencegah Belanda kembali berkuasa.

Apa benar demikian?

Jawabannya tidak, sebab di masa itu luas wilayah Kabupaten Karo pada tahun 1946 membentang dari Langkat di utara hingga Dairi di selatan, serta dari Aceh di barat hingga Deli Serdang di timur.

Secara historis dan geografis, batas-batas bentangan wilayah kekuasaan Karo pada tahun 1946 meliputi area berikut:

1. Sisi Utara (Batas Atas)

Membentang dari wilayah perbatasan Langkat (kawasan perkebunan karet/tembakau bawah) hingga ke hulu Deli Serdang (daerah Pancur Batu dan Sibolangit).

2. Sisi Selatan (Batas Bawah)

Membentang hingga ke perbatasan Singkil/Dairi (daerah perbukitan menuju Danau Toba).

Sisi Barat (Batas Kiri): Membentang sampai ke Tanah Alas (sekarang wilayah Aceh Tenggara) yang menjadi benteng pertahanan alami berupa hutan lebat.

3. Sisi Timur (Batas Kanan)

Membentang hingga ke dataran tinggi Simalungun (daerah sekitar Saribudolok).

Pusat bentangan dari wilayah ini adalah Kabanjahe dan Berastagi, yang menjadi titik kumpul utama logistik militer serta fokus utama dari strategi bumi hangus ketika militer Belanda mencoba merangsek naik dari arah Medan melintasi jalur Sibolangit.

Hal inilah yang menjadikan Tanah Karo adalah basisnya para pejuang.

Pada bulan November 1947, pusat pemerintahan Republik Indonesia sudah dipindahkan dari Jakarta ke Yogyakarta akibat tekanan Agresi Militer Belanda I. Jadi, pimpinan tertinggi militer yakni Jenderal Soedirman, dan pimpinan sipil yakni Presiden Sukarno dan Wapres Moh. Hatta mengendalikan jalannya taktik perang gerilya dari Yogyakarta, bukan dari Jakarta.

Dalam buku biografi berjudul 'Kilap Sumagan: Sejarah Perjuangan Selamat Ginting' disebutkan bila intelijen rakyat bentukan Selamat

Ginting bekerja efektif memberikan data posisi pasukan Belanda di sepanjang jalur Sibolangit secara berkala sebelum perintah bumi hangus dijatuhkan.

Mayor Selamat Ginting, memiliki nama julukan adat Kilap Sumagan adalah salah satu tokoh militer dan pejuang kemerdekaan paling berpengaruh di Sumatra Utara. Pada masa pergerakan nasional, ia dikenal sebagai tokoh berhaluan marhaenis (Nasionalis kiri) dan merupakan pendiri sekaligus pemimpin tertinggi laskar pemuda Napindo (Nasional Indonesia) di Tanah Karo.

Saat peristiwa Agresi Militer Belanda I (1947) meletus, posisinya secara struktural militer resmi adalah Komandan Sektor III / Brigade A Divisi X Komando Sumatra. Wilayah komandonya memegang tanggung jawab penuh atas garis pertahanan militer dan laskar rakyat yang meliputi kawasan Tanah Karo, Dairi, Langkat, hingga Aceh Tenggara.

Bagaimana Selamat Ginting Tahu Belanda Masih Masuk ke Karo?

Mayor Selamat Ginting mengetahui dengan pasti bahwa militer Belanda telah menjebol perbatasan dan bergerak masuk ke jantung wilayah Tanah Karo melalui tiga instrumen intelijen lapangan berikut:

1. Jaringan Intelijen Sipil Akar Rumput Napindo

Sebagai pendiri laskar pemuda Napindo Halilintar yang memiliki basis massa sangat besar, Selamat Ginting memiliki mata dan telinga informal di sepanjang jalur masuk dari Medan menuju Berastagi (seperti daerah Pancurbatu dan Sibolangit). Para petani, pedagang, dan pemuda setempat memantau setiap konvoi tank, panser, dan infanteri mekanis Belanda. Informasi ini kemudian dikirim secara estafet menggunakan kurir sepeda motor dan penunggang kuda rahasia langsung ke pos komando depan Selamat Ginting.

2. Laporan Taktis Kontak Senjata Garda Depan

Sebelum Belanda menguasai Kabanjahe dan Berastagi, pasukan elite bentukan Selamat Ginting bernama Pasukan Halilintar ditempatkan di garis demarkasi paling depan. Ketika pos-pos pertahanan luar di lereng perbatasan mulai jatuh satu per satu akibat kalah persenjataan berat, para komandan kompi di lapangan mengirimkan laporan taktis kontak senjata ke Markas Sektor III, mengkonfirmasi bahwa perimeter luar pertahanan Republik telah jebol.

3. Pantauan Visual Arus Pengungsian Massal

Dari Pos Komando Depan Sektor III yang berada di kawasan Gung Rahu (dekat Rumah Sakit Umum Kabanjahe), Selamat Ginting menyaksikan langsung gelombang kepanikan arus pengungsian massal warga desa yang berlarian dari arah utara perbatasan. Laporan langsung dari para Pengulu (Kepala Desa Adat) yang ikut mengungsi memberikan kepastian hukum dan visual mutlak bahwa tank Belanda tinggal hitungan jam saja dari pusat kota.

Mengetahui musuh kembali ke Taneh Karo, Selamat Ginting mengeluarkan perintah mutlak untuk melaksanakan politik bumi hangus terhadap seluruh fasilitas vital, rumah sipil, dan kantor pemerintahan.

Mayor Selamat Ginting memerintahkan Koran Karo-karo untuk menyampaikan pesan instruksi lisan Perintah Operasi Bumi Hangus Sektor III kepada Bupati Karo kala itu, Rakutta Brahmana.

Koran Karo-Karo (7 Juli 1920 – 11 Maret 1991) adalah seorang pengusaha transportasi lokal sekaligus gerilyawan berdarah dingin. Sebelum pecahnya revolusi fisik, ia memiliki kendali atas jaringan armada angkutan di Tanah Karo. Perusahaan angkutan raksasa yang ia pimpin bersama tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya, R.M. Pandia bernama Mas Persada. Perusahaan ini adalah sebuah konglomerasi transportasi bus dan truk lokal di Tanah Karo yang armadanya dikonversi penuh menjadi penyokong logistik tempur saat revolusi fisik bergejolak.

"Bupati, moncong tank Belanda sudah di depan mata. Mayor Selamat Ginting memerintahkan kita mundur dan membakar kota ini agar tidak jadi pangkalan musuh. Jangan cemaskan evakuasi rakyat. Perintahkan pamong praja bergerak malam ini. Seluruh truk N.V. Mas Persada saya kerahkan gratis untuk mengosongkan lumbung padi dan mengangkut orang tua serta anak-anak ke Lau Baleng," kata Koran Karo-Karo kepada Rakutta Brahmana kala itu.

BUPATI RAKUTTA BRAHMANA DAN DJAMIN GINTING SEMPAT MENOLAK TAKTIK BUMI HANGUS

Sebagai kepala pemerintahan sipil, membakar kota yang ia bangun dan meratakan rumah-rumah adat Siwaluh Jabu, simbol peradaban luhur masyarakat Karo adalah keputusan yang menyayat hati.

Saat Koran Karo-karo memaparkan cetak biru operasional bumi hangus dari Mayor Selamat Ginting di hadapan Bupati Rakutta dan Letkol Djamin Ginting, kedua pimpinan tertinggi ini secara tegas memberikan penolakan awal.

Dari sudut pandang Rakutta Sembiring, membakar puluhan kampung di tengah iklim pegunungan Karo yang dingin ekstrem tanpa adanya kesiapan jalur logistik pengungsian dipandang Rakutta sebagai tindakan gegabah yang akan membunuh rakyat sipil secara perlahan di dalam hutan. Rumah Adat Siwaluh Jabu bukanlah sekadar bangunan tempat tinggal, melainkan simbol kedaulatan kultur Karo. satu unit Siwaluh Jabu dihuni oleh 8 hingga 16 kepala keluarga secara komunal.

Demikian juga oleh Djamin Ginting, sebagai komandan pasukan resmi yang tunduk pada hukum komando pusat, Letkol Djamin Ginting menolak didikte oleh taktik laskar rakyat yang dinilai terlalu emosional:

Ia percaya pada kekuatan pasukan reguler, dan taktik pertahanan konvensional dan gerilya hutan terpimpin oleh Resimen IV masih mampu menahan atau setidaknya merepotkan laju kavaleri tank Belanda (NICA) tanpa harus menghancurkan infrastruktur kota. Bumi hangus dinilai sebagai opsi paling akhir (*the absolute last resort*).

Disiplin Komando Vertikal: Djamin Ginting mengkhawatirkan bahwa aksi bumi hangus sepihak tanpa koordinasi matang dengan Markas Besar Divisi X Sumatera di tingkat atas akan menciptakan kekacauan koordinasi logistik militer berskala makro.

KORAN KARO-KARO TETAP MEMAKSA UNTUK LAKUKAN TAKTIK BUMI HANGUS

Kebuntuan dan penolakan keras dari dwi-tunggal pimpinan ini akhirnya pecah melalui sebuah aksi pembuktian taktis yang dramatis di lapangan.

Koran Karo-karo mengambil langkah tmiliter untuk meruntuhkan beban psikologis semua pihak. Di hadapan para pemimpin dan disaksikan laskar pejuang, Koran Karo-karo menyulut obor dan membakar rumah pribadinya sendiri hingga rata dengan tanah. Rumah itu berada di Gang Rahu, tak jauh dari Rumah Sakit Umum Kabanjahe.

Dari peristiwa ini, setidaknya dua kota dan 51 kampung hangus terbakar hingga akhir Desember 1947. Rumah-rumah adat yang besar dan megah ikut musnah, dengan jumlah berkisar antara 30 hingga 95 unit di setiap kampung. Jika diakumulasikan, terdapat lebih dari 1.000 rumah adat yang terbakar.

Kantor Raja Urung Lima Senina di Batukarang yang megah juga ikut terbakar pada 25 November 1947. Peristiwa tragis ini terjadi sehari setelah pengungsian besar-besaran rakyat ke arah Lau Baleng, Tiga Binanga, Tiga Lingga, dan wilayah sekitarnya.

Meski sudah melihat aksi rekannya yang seperti itu, Rakutta Brahmana dan Djamin Ginting dikabarkan masih terus menolak untuk melakukan aksi pembakaran rumah warga Karo. Tapi, akhirnya, melalui perenungan panjang, tampaknya keduanya akhirnya memutuskan untuk mengikuti permintaan Koran Karo-Karo meski dengan berat hati.

Keesokan harinya, 26 November 1947 mulai pukul 06.00 WIB, api perjuangan menjalar sistematis, menggunakan taktik perang gerilya. Selama lima bulan, dari Juli hingga Desember 1947, tercatat terjadi 225 kali pertempuran. Artinya, pertempuran meletus hampir setiap hari. Jumlah ini disinyalir merupakan intensitas pertempuran tertinggi dibanding-kan dengan peristiwa serupa di Pulau Jawa.

DUA TAHUN ORANG KARO DI PENGUNGISAN SEJAK KARO LAUTAN API

Taktik bumi hangus (scorched earth policy) yang dahulu diagungkan sebagai simbol perlawanan semesta - seperti peristiwa Karo Lautan Api (1947) atau Bandung Lautan Api (1946) - kini telah bertransformasi menjadi salah satu tindakan paling terlarang di muka bumi. Di abad modern, perintah untuk membakar kota, memusnahkan lumbung padi, atau meracuni sumber air tidak lagi dianggap sebagai strategi pertahanan heroik, melainkan sebuah Kejahatan Perang (War Crime).

mengubah pusat kota dan total 53 kampung adat di seantero Tanah Karo menjadi lautan abu, memastikan militer Belanda hanya menduduki kota mati yang lumpuh total.

Pembakaran rumah dan kantor-kantor dilakukan di Berastagi dan Kabanjahe dalam pengawasan Tama Ginting dan Dalangit Ginting. Dan menjalar hingga ke 51 kampung.

Dari peristiwa ini, setidaknya dua kota dan 51 kampung hangus terbakar hingga akhir Desember 1947. Rumah-rumah adat yang besar dan megah ikut musnah, dengan jumlah berkisar antara 30 hingga 95 unit di setiap kampung. Jika diakumulasikan, terdapat lebih dari 1.000 rumah adat yang terbakar.

Kantor Raja Urung Lima Senina di Batukarang yang megah juga ikut terbakar pada 25 November 1947. Peristiwa tragis ini terjadi sehari setelah pengungsian besar-besaran rakyat ke arah Lau Baleng, Tiga Binanga, Tiga Lingga, dan wilayah sekitarnya.

Di sisi lain, ribuan pemuda terus berjuang melawan Belanda Masa pengungsian total Orang Karo berlangsung di tahun 1947 – 1949. Di masa iti, Orang Karo bertahan hidup di tenda, gubuk, dan tangsi darurat selama dua tahun penuh. Selama periode ini, wilayah perkotaan Kabanjahe dan Berastagi praktis dikuasai Belanda, namun dalam kondisi "kota mati" yang hancur.

Bupati Rakutta Sembiring Brahmana bersama Letkol Djamin Ginting membagi rute pengungsi-an massal ke wilayah Karo Selatan, Karo Barat, hingga menembus perbatasan Tanah Alas (Aceh Tenggara).

Tempat-tempat pengungsian tersebut meliputi:

- Tiga Binanga

Wilayah ini menjadi Pusat Pemerintahan Sipil Darurat Kabupaten Karo setelah Bupati Rakutta Sembiring secara resmi memindahkan ibu negeri dari Kabanjahe yang telah dibakar.

- Laubaleng dan Mardinding

Kawasan ini dijadikan Markas Komando Taktis Pertahanan pasukan Resimen IV TNI pimpinan Letkol Djamin Ginting serta laskar Napindo Halilintar pimpinan Mayor Selamat Ginting. Daerah ini dipilih karena posisinya strategis dan dekat dengan perbatasan Kutacane (Aceh), yang menjadi jalur utama pasokan logistik senjata dan makanan bagi para pejuang.

-Hutan Pedalaman Lereng Pegunungan

Sebagian besar warga sipil yang membawa hewan ternak terpaksa tinggal di gubuk-gubuk darurat yang dibangun secara komunal di dalam hutan lebat untuk menghin-dari patroli udara dan pasukan antigerilya Belanda

Situasi pengungsian sempat semakin mencekam ketika Belanda melancarkan Agresi Militer II pada Desember 1948. Garis pertahanan gerilya di Laubaleng dan Mardinding diserang hebat, memaksa rakyat bergerak masuk lebih jauh ke wilayah Tanah Alas, Aceh.

Setelah gencatan senjata internasio-nal disepakati dan Belanda dipaksa menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia pada Desember 1949, barulah Bupati Rakutta Sembiring dan jajaran militer mengawal kepulangan gelombang pengungsi Karo untuk kembali ke kampung halaman mereka yang telah menjadi puing guna memulai rekonstruksi pembangunan daerah.

Djamin Ginting dan para saksi sejarah mengonfirmasi bahwa jatuhnya korban jiwa di pengungsi-an adalah hal yang tak terhindarkan. Rakyat harus bertahan hidup selama 2 tahun di gubuk-gubuk darurat di dalam hutan lebat wilayah Tiga Binanga, Laubaleng, hingga menembus Kutacane (Aceh). Korban jiwa dari warga sipil-terutama anak-anak, wanita, dan lansia - mayoritas disebabkan oleh wabah penyakit seperti malaria, disentri, dan busung lapar melanda kamp pengungsian akibat buruknya sanitasi dan minimnya obat-obatan yang terputus dari jalur kota.

Lalu, hipotermia dan kelaparan sebab suhu dingin ekstrem yang sering terjadi di pegunungan Karo serta menipisnya stok logistik pangan karena blokade ekonomi oleh tentara Belanda memicu malanutrisi akut yang merenggut nyawa pengungsi sipil.

Selain faktor alam, korban jiwa dari masyarakat sipil jatuh akibat serangan militer langsung. Selama masa pengungsian, Belanda membentuk satuan khusus antigerilya bernama *Troopen Intelligence Vor Gerilya* (TIVG) yang dipimpin oleh komandan kejam bernama Van der Plank.

Van der Plank kerap mengendus posisi pengungsian dan melakukan teror serta eksekusi mati di tempat terhadap penduduk desa sipil seperti di Kuta Sigarang-garang yang ketahuan menyuplai makanan atau menyembunyikan para gerilyawan.

TAKTIK BUMI HANGUS DAN PERANG GERILYA TERBUKTI BERHASIL MENYELAMAT-KAN ACEH DARI SERBUAN MILITER DARAT BELANDA PADA TAHUN 1947 (AGRESI MILITER I)

Arsip sejarah militer menunjukkan bahwa taktik bumi hangus dan perang gerilya yang dipimpin Mayor Selamat Ginting serta Mayor Djamin Ginting di Tanah Karo berhasil mematahkan ofensif Belanda selama Agresi Militer I pada tahun 1947. Strategi ini menghancurkan logistik Belanda dan mencegah invasi darat ke Aceh, menjadikannya satu-satunya wilayah Republik yang steril dari pendudukan kolonial.

DJAMIN GINTING DAN RAKUTTA BRAHMANA BENAR, TAKTIK BUMI HANGUS AKHIRNYA DISEBUT KEJAHATAN PERANG

Taktik bumi hangus (*scorched earth policy*) yang dahulu diagungkan sebagai simbol perlawanan semesta - seperti peristiwa Karo Lautan Api (1947) atau Bandung Lautan Api (1946) - kini telah bertransformasi menjadi salah satu tindakan paling terlarang di muka bumi. Di abad modern, perintah untuk membakar kota, memusnahkan lumbung padi, atau meracuni sumber air tidak lagi dianggap sebagai strategi pertahan-an heroik, melainkan sebuah Kejahatan Perang (*War Crime*).

Sebuah strategi militer yang pada tahun 1947 dielu-elukan sebagai puncak heroisme tertinggi demi kedaulatan NKRI, di abad ke-21 ini tidak boleh lagi ditiru atau digunakan oleh militer negara mana pun karena telah dicap sebagai kejahatan kemanusiaan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional di Den Haag.

Awal Mula Sejarahnya Bagaimana?

1. Titik Awal Regulasi: Francis Lieber (1863)

- Aktor Pencetus: Francis Lieber, seorang pakar hukum keturunan Jerman-Amerika yang diinstruksikan oleh Presiden AS Abraham Lincoln.
- Instrumen Hukum: Lieber Code (1863) atau Instruksi untuk Angkatan Darat AS di Lapangan.
- Rekam Sejarah: Ini adalah dokumen hukum pertama dalam sejarah modern yang mencoba membatasi bumi hangus. Dalam Pasal 15 dan 44, Lieber merumuskan bahwa pembakaran properti dan pengrusakan wilayah musuh hanya diperbolehkan jika ada Military Necessity (Kebutuhan Militer mendesak). Tindakan membumi-hanguskan wilayah secara semena-mena (*wanton devastation*) resmi dilarang untuk pertama kalinya.

2. Standardisasi Eropa: Konvensi Den Haag (1899 & 1907)

- Aktor Pencetus: Komunitas Negara-Negara Eropa dalam Konferensi Perdamaian Internasional di Belanda.
- Instrumen Hukum: Konvensi Den Haag IV 1907 (Khususnya *Hague Regulations*).
- Rekam Sejarah: Regulasi ini mengikat seluruh militer di Eropa. Pasal 23(g) menyatakan secara tegas bahwa dilarang keras menghancurkan atau menyita properti musuh, kecuali jika penghancuran tersebut benar-benar dituntut oleh kedaruratan perang. Dokumen ini menjadi dasar hukum utama untuk mengadili para jenderal di kemudian hari.

3. Pasca-Perang Dunia II: Pengadilan Nuremberg (1945)

- Aktor Pencetus: Sekutu (AS, Inggris, Uni Soviet, Prancis) melalui International Military Tribunal (IMT).
- Instrumen Hukum: Piagam Nuremberg 1945, Pasal 6(b) mengenai Kejahatan Perang.
- Rekam Sejarah: Di sinilah taktik bumi hangus pertama kali disidangkan secara massal sebagai tindak pidana internasional. Jenderal-jenderal Nazi Jerman, seperti Jenderal Lothar Rendulic, diadili karena memerintahkan bumi hangus total di wilayah Finnmark, Norwegia pada tahun 1944. Rendulic menghancurkan 11.000 rumah warga dan utilitas kota demi menahan laju tentara Uni Soviet. Kasus ini dikenal sebagai Rendulic Affair dalam yurisprudensi hukum perang.

4. Kunci Kriminalisasi Mutlak: Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa (1977)

- Aktor Pencetus: Komite Internasional Palang Merah (ICRC) dan Majelis Umum PBB.
- Instrumen Hukum: Pasal 54 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977.
- Rekam Sejarah: Ini adalah tonggak sejarah paling radikal. Pasal ini menutup rapat-rapat celah "kebutuhan militer" yang sering dipakai para jenderal untuk membakar kota. Pasal 54 secara mutlak melarang penghancuran objek-objek vital bagi kelangsungan hidup penduduk sipil, termasuk lumbung pangan, kawasan pertanian, hewan ternak, dan instalasi air bersih. Sengaja membuat warga sipil kelaparan melalui taktik bumi hangus resmi dikategorikan sebagai kejahatan fatal.

5. Era Mahkamah Internasional: Statuta Roma (1998)

- Aktor Pencetus: PBB melalui Konferensi Diplomatik Utusan Penuh di Roma.
- Instrumen Hukum: Pasal 8 Statuta Roma 1998 (Dasar pendirian International Criminal Court / ICC).
- Rekam Sejarah: Statuta ini mengodifikasi bumi hangus ke dalam yurisdiksi permanen Mahkamah Pidana Internasional di Den Haag. Pelaku bumi hangus kini tidak lagi diadili di pengadilan militer domestik, melainkan bisa diseret langsung sebagai penjahat perang internasional jika negaranya meratifikasi statuta ini.

Dengan kata lain, sebuah strategi militer yang pada tahun 1947 dielu-elukan sebagai puncak heroisme tertinggi demi kedaulatan NKRI, di abad ke-21 ini tidak boleh lagi ditiru atau digunakan oleh militer negara mana pun karena telah dicap sebagai kejahatan kemanusiaan yang tunduk pada yurisdiksi Mahkamah Internasional di Den Haag.*

KOLOM IKLAN

Kembangkan Bisnis Anda Bersama Tabloid Tamaije!

Dalam rangka memberikan ruang promosi yang efektif, kredibel, dan berdaya jangkau luas bagi para pelaku usaha, investor, serta instansi, Tabloid Tameije kini membuka kesempatan pemasangan iklan untuk edisi mendatang.

Pilihlah format iklan yang paling sesuai dengan kebutuhan strategi pemasaran Anda:

IKLAN POSISI PREMIUM (PAKET KAVLING)

Halaman strategis dengan visibilitas tertinggi untuk memperkuat citra brand Anda:

- Banner Halaman Depan (Full Color) | Ukuran: 5 x 50 mmk | Rp31.500.000 /terbit
- Banner Halaman Belakang (Full Color) | Ukuran: 5 x 50 mmk | Rp16.000.000 /terbit
- Banner Halaman Dalam (Black & White) | Ukuran: 5 x 50 mmk | Rp4.350.000 /terbit

IKLAN DISPLAY & ADVERTORIAL (ARTIKEL PARIWARA)

Sangat tepat untuk publikasi laporan keuangan, prospektus bisnis, promosi produk detail, atau edukasi pasar:

- Advertorial (Black & White) | Min. 40 s.d. 1.900 mmk | Rp29.000 /mmk
- Iklan Kolom / Display (Black & White) | Min. 20 s.d. 150 mmk | Rp26.500 /mmk

IKLAN BARIS (FORMAT EKONOMIS)

Solusi praktis dan hemat untuk iklan teks, pengumuman lelang, kehilangan dokumen, atau lowongan kerja:

- Tarif: Rp11.200 s.d. Rp14.400 per baris.
- Ketentuan: Minimal 3-4 baris, maksimal 10 baris (maksimum 32 karakter per baris termasuk spasi).

+62 853-3806-3932
KaroFoundation
@karo_foundation
karo foundation
karofoundation.org
karo.foundation

Kemerdekaan RI Tak Lepas dari Andil Pejuang Wanita Karo, Tabana Bangun Bagikan Refleksi HUT RI ke-81

Oleh: Elitha Evinora beru Tarigan

Menatap hamparan hijau Taneh Karo dari penanjakan Sembahe hingga Berastagi membawa ingatan kita pada sepotong fragmen sejarah yang nyaris terlupakan. Di balik kokohnya Gunung Sinabung dan Sibayak, tersimpan kisah kepahlawanan yang tidak hanya ditulis oleh darah kaum pria, tetapi juga oleh keringat dan air mata para wanita Karo.

Dalam sebuah perbincangan mendalam, Pemred Tamaije berkesempatan berbincang dengan Irjen Pol. (Purn.) Drs. Tabana Bangun, M.Si. Tokoh Korps Bhayangkara asal Tanah Karo ini membagikan refleksi mengenai makna kemerdekaan, gugatan terhadap mitos budaya lama, hingga visi masa depan untuk tanah kelahirannya

PRIA & WANITA SETARA DI GARIS DEPAN PERJUANGAN

Bagi Jenderal bintang dua yang baru saja memasuki masa purnabakti ini, proklamasi Agustus 1945 bukan milik segelintir kelompok. Kemerdekaan adalah rajutan kolektif dari perjuangan seluruh rakyat Indonesia, di mana masyarakat Karo - di mana pun mereka berada - turut ambil bagian.

"Termasuk di dalamnya adalah perjuangan para wanita Karo yang ikut andil dalam memperjuangkan kemerdekaan itu," ujar Tabana dengan nada tegas.

Menjelang peringatan HUT RI ke-81, Tabana mengingatkan pentingnya menumbuhkan kembali solidaritas sesama bangsa. Baginya, menghargai kemerdekaan berarti memberikan penghormatan setinggi-tingginya kepada para wanita Karo yang sudah angkat senjata dan berjuang jauh sebelum kibaran Sang Saka Merah Putih resmi berkibar di atas bumi pertiwi.

TABANA BANGUN INGIN WANITA KARO MAJU

Namun, perjuangan belum usai. Mengisi kemerdekaan hari ini, menurut Tabana, menuntut keberanian untuk merombak cara pandang. Ia menyoroti beberapa aspek budaya tradisional di desa-desa (i kuta-kuta) yang tanpa sadar memasung kaum perempuan.

Kita tentu sering mendengar seloroh lama yang mengatakan bila "adi diberu la pedah sekolah meganjang"- bahwa anak perempuan tidak perlu bersekolah tinggi-tinggi karena ujung-ujungnya "adi diberu ku dapur" (perempuan hanya untuk urusan dapur).

"Budaya sekarang harus menyesuaikan dengan kemajuan zaman. Bahwa sekarang diberi (perempuan) itu sama dengan dilaki (laki-laki)," gugat Tabana.

Ia menegaskan bahwa menyelaraskan adat dengan modernitas bukan berarti melanggar kodrat, melainkan menempatkan perempuan di posisi yang sejajar, bukan lagi di belakang. Wanita Karo hari ini harus berani tampil, membuang keraguan, dan mengoptimalkan ilmu yang mereka miliki.

"Perempuan harus jadi pelopor pembangunan, bukan sekadar menyiapkan makanan di dapur," tambahnya.

WANGI PARIWISATA DAN TOILET BERSIH DI TANEH KARO

Berbicara tentang kemerdekaan yang adil dan makmur sesuai amanat UUD 1945 alinea ke-4, Tabana melihat masa depan ekonomi Taneh Karo bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu: keindahan alam, kekayaan pertanian, dan keunikan budaya. Tiga potensi besar ini adalah magnet kuat untuk menarik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Namun, mengemas potensi tersebut memerlukan strategi konkret. Tabana tidak hanya berbicara tentang keindahan makro, ia justru menyoroti hal-hal mikro yang sering kali luput dari perhatian: kebersihan fasilitas dasar.

"Kebersihan harus jadi bagian pokok yang kita tawarkan ke wisatawan. Salah satu fasilitas utama adalah kebersihan, mulai dari restoran, jalan, kampung, sanitasi, kamar mandi, hingga toilet dan tempat pembuangan sampah," urainya secara rinci.

Bagi mantan Kapolda Kepri ini, kenyamanan dan keramahan (*hospitality*) masyarakat adalah kunci pembuka gerbang ekonomi. Jika masalah keamanan terjamin, keterbukaan terjaga, dan kebersihan lingkungan menjadi budaya baru yang dipraktikkan sehari-hari, maka tidak ada lagi hambatan untuk mendatangkan pelancong ke Taneh Karo.

Ketika pelayanan prima itu terwujud, roda ekonomi akan berputar lebih cepat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah akan meningkat, dan kesejahteraan masyarakat Karo akan langsung terdongkrak.

LEBIH DARI SEKADAR URAT NADI TRANSPORTASI

Selama puluhan tahun, jalur Sembahe-Berastagi dikenal sebagai urat nadi vital yang menghubungkan roda ekonomi, menyalurkan hasil bumi, dan membawa para pelancong menuju jantung Taneh Karo. Namun di mata Tabana, maknanya kini telah bertransformasi jauh lebih dalam.

"Jalur ini bukan lagi sekadar urat nadi transportasi, melainkan simbol dari harapan baru," tegas mantan Kapolda Kepri tersebut.

Mulusnya jalanan ini adalah pembuka gerbang bagi impian-impian yang selama ini tertunda. Ia menjadi karpet merah bagi kebangkitan ekonomi daerah, sebuah simbol kesiapan Taneh Karo untuk menyambut dunia dengan wajah yang lebih segar, aman, dan terbuka.

TIGA PILAR HARAPAN: BERDAULAT, BERSIH, DAN SETARA

Di atas fondasi jalan yang mulus itulah, Tabana merajut sebuah visi tentang masa depan tanah kelahirannya. Harapan baru yang ia maksud berdiri kokoh di atas tiga pilar utama:

- atas kaki sendiri, mengoptimalkan pertumbuhan ekonomi, dan menyejahterakan masyarakatnya melalui potensi lokal yang melimpah. Kedaulatan dan Kemandiri-an: Sebuah cita-cita di mana Taneh Karo mampu berdiri di

- Pariwisata yang Bersih: Menjadikan alam, pertanian, dan budaya Karo sebagai magnet dunia. Kuncinya bukan lagi sekadar keindahan, melainkan komitmen total terhadap kebersihan - mulai dari restoran, sanitasi, hingga toilet umum di sepanjang jalur wisata.

- Emansipasi yang Nyata: Meruntuhkan sekat-sekat mitos budaya lama yang membatasi langkah kaum perempuan.

GARDA TERDEPAN DI TANGAN WANITA KARO

Harapan baru ini tidak akan pernah utuh tanpa kehadiran para perempuan tangguh. Tabana memimpikan sebuah zaman di mana tidak ada lagi istilah "adi diberu ku dapur" (perempuan hanya di dapur). Ia ingin melihat perempuan-perempuan Karo mengambil peran sentral dalam menentukan arah masa depan daerah.

"Sebuah harapan di mana Taneh Karo tumbuh berdaulat dan mandiri, digerakkan oleh pariwisata yang bersih, serta dipimpin oleh wanita-wanita Karo yang melangkah berani di garda terdepan pembangunan," pungkasnya penuh penekanan.

*



Irjen Pol (Purn) Drs. Tabana Bangun, M.Si
(Foto: Istimewa)